

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan.

Analisis kinerja BPKD dalam pengelolaan keuangan daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006 adalah sebagai berikut :

1. Dari aspek produktifitas sudah efektif karena pos pendapatan daerah baik dari pajak dan retribusi meningkat setiap tahunnya dan pos belanja daerah sesuai target yang ditetapkan dalam APBD setiap tahunnya. Disamping itu tingkat realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan.
2. Dilihat dari aspek responsivitas, pihak BPKD sebuah organisasi masih kurang dalam merespon adanya tuntutan dari masyarakat hal ini terlihat dalam melakukan pekerjaan atau praktek responsivitas.
3. Dilihat dari aspek profesionalisme, penulis melihat bahwa BPKD masih kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya, hal tersebut bisa dilihat dari masih banyaknya pegawai yang korupsi waktu, tidak bisa mengoperasikan komputer dengan baik, hingga pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang hanya mengganti dengan laporan pada tahun sebelumnya.
4. Sedangkan dilihat dari aspek akuntabilitas, di BPKD masih jauh dari yang diharapkan atau tuntutan reformasi karena setiap organisasi pemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan dari semua apa yang telah dikerjakan dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat (akuntabel). Serta mereka

tidak memandang betapa pentingnya laporan tersebut sebagai bahan evaluasi.

## B. Saran

- 1 Untuk memperbaiki profesionalisme para pegawai BPKD ditingkatkan lagi SDM agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan dilakukan berdasarkan profesionalitas pegawai. Peningkatan SDM tidak hanya ditujukan kepada para pegawai bawahan, namun sampai ditingkat atas. Agar terjadi sinkronisasi antar sesama pegawai baik atasan maupun bawahan pada saat praktek dilapangan atau dalam tugasnya melayani masyarakat.
- 2 Untuk meningkatkan efektivitas dalam mengelola pendapatan daerah peneliti menyarankan :
  - a. Perlu dilakukan intensifikasi pemungutan pendapatan daerah, antara lain yaitu : (i) validasi sistem pendataan sumber-sumber pendapatan daerah baik dari aspek obyek maupun subyeknya (ii) peningkatan kinerja petugas pemungut baik melalui peningkatan disiplin maupun kesejahteraannya, (iii) penentuan target setiap tahun disesuaikan dengan potensi riil yang ada.
  - b. Pengaturan upah pungut yang lebih transparan dan proporsional sehingga pembagian upah pungut sesuai dengan beban yang diemban masing-masing unit pemungut dan petugasnya.
  - c. Pemerataan peran masing-masing pegawai, misalnya dengan membuat rincian tugas bagi setiap individu pegawai